



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**



RENJA 2024

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN**



DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga mempedomani ataupun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 serta mempedomani kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi.

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng substansinya memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Renja ini akan menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), penyusunan LKjIP serta program dan kegiatan lainnya yang terkait.

Kami selaku Pimpinan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menaruh harapan besar agar Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan masalah sosial di Kabupaten Buleleng, sehingga masyarakat Buleleng semakin sejahtera.

Dengan telah selesainya penyusunan Renja Perubahan ini, tidak lupa kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini, semoga apa yang telah diberikan mendapat rahmat/karunia dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, 23 Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199103 1 053

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/369/HK/24
TENTANG
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
2.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2024	7
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	22
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	26
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	38

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga pemerintah di daerah, maka dalam sistem perencanaan pembangunan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi yang saling terkait antara perencanaan ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diamanatkan bagi daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dalam upaya pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari suatu perencanaan, baik perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun yang bersifat perencanaan tahunan (RKP). Berkaitan dengan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya menyusun Rancangan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program prioritas yang disampaikan/disosialisasikan pada waktu menjadi Calon Bupati serta paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Berkenaan dengan ketentuan dimaksud Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2023-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Berkenaan dengan amanat tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra yang dituangkan dalam setiap tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilaksanakan dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Melalui Renja Dinas Sosial akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Sosial Kabupaten Buleleng akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya

sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan perencanaan di atasnya serta peraturan perundangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja/Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 12. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 17. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033;

22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk terwujudnya konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan dalam lingkup Dinas Sosial dan tersedianya pedoman Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2024 maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2024.
2. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng, serta dasar/acuan Dinas Sosial untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dari Penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV: PENUTUP

BAB II**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024****2.1. Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2024**

Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang sosial yang dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2024. Pencapaian kinerja tahun 2024 triwulan II tersebut di dukung melalui pelaksanaan 5 program, 6 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yang menjadi program utama dan 1 program, 5 kegiatan serta 15 sub kegiatan yang menjadi program penunjang dengan jumlah anggaran dari dana belanja sebesar Rp.15.030.032.435,00 dengan realisasi triwulan II sebesar Rp.5.745.229.853,00 atau 38,22%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan tergambar pada realisasi belanja langsung. Pencapaian target program kegiatan sudah tercapai secara fisik untuk triwulan II sebesar 50,67%.

Pelaksanaan program dan kegiatan tercapai tentunya berkat dukungan dan koordinasi dari Dinas/Instansi terkait, partisipasi aktif dari masyarakat, para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT) yang ada di masing masing Desa serta Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di masing- masing Kecamatan, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Buleleng.

Adapun Tabel Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				15.030.032.435				5.745.229.853
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	5.932.618.226	APBD II		57,16 %	3.033.716.995
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	116.447.478	APBD II		50 %	46.522.340

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	14 Dokumen	55.635.743	APBD II		7 Dokumen	22.280.770
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	8 Laporan	60.811.735	APBD II		4 Laporan	24.241.570
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	4.719.333.173	APBD II		51,85 %	2.584.898.781
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	27 Orang	4.322.044.435	APBD II		15 Orang	2.422.631.556

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminitrasi tugas ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Dokumen	239.770.069	APBD II		6 Dokumen	98.064.115
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Dokumen	157.518.669	APBD II		6 Dokumen	64.203.110
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	101.704.082	APBD II		79,17 %	27.401.600
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1 Paket	3.026.645	APBD II		1 Paket	2.201.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2 Paket	79.294.400	APBD II		1 Paket	14.005.000
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	3 Paket	11.703.037	APBD II		2 Paket	4.285.600
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	6 Laporan	7.680.000	APBD II		6 Laporan	6.910.000
1	06	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	866.723.493	APBD II		50 %	336.524.774
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	68.111.495	APBD II		6 Laporan	27.828.605

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	242.477.981	APBD II		6 Laporan	99.263.026
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	281.936.000	APBD II		6 Laporan	88.742.250
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	274.198.017	APBD II		6 Laporan	120.690.893
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	128.410.000	APBD II		54,77 %	38.369.500

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	34 Unit	81.620.000	APBD II		20 Unit	29.309.500
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	69 Unit	46.790.000	APBD II		35 Unit	9.060.000
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kabupaten Buleleng	80 %	2.978.641.819	APBD II		43,22 %	1.121.969.160
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS yang aktif	Kabupaten Buleleng	80 %	2.978.641.819	APBD II		43,22 %	1.121.969.160

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	9 Orang	76.100.000	APBD II		4 Orang	31.700.000
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	598 Keluarga	2.099.569.356	APBD II		548 Keluarga	1.067.441.090

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	6 Lembaga, 17 LKS	802.972.463	APBD II		1 Lembaga, 6 LKS	22.828.070
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS	Kabupaten Buleleng	9,86 %	4.548.484.379	APBD II		4,22 %	1.077.103.497
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapat pelayanan	Kabupaten Buleleng	9,86 %	4.475.788.076	APBD II		5,69 %	1.057.730.827

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						rehabilitasi sosial							
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	220 Orang	164.211.495	APBD II		220 Orang	112.965.870
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	25 Orang	63.658.152	APBD II		5 Orang	10.189.835
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	49.016.303	APBD II		42 Orang	19.722.670

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	63.906.303	APBD II		52 Orang	33.209.670
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	2.110 Orang	4.134.995.823	APBD II		1.570 Orang	881.642.782

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza di luar panti sosial yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Kabupaten Buleleng	9,86 %	72.696.303	APBD II		2,76 %	19.372.670
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	72.696.303	APBD II		28 Orang	19.372.670
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kabupaten Buleleng	100 %	253.111.493	APBD II		50 %	107.631.815

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin	Kabupaten Buleleng	100 %	253.111.493	APBD II		50 %	107.631.815
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kabupaten Buleleng	4.000 Orang	178.052.575	APBD II		2.000 Orang	76.789.710
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat KPM yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	500 Keluarga	75.058.918	APBD II		250 Keluarga	30.842.105
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Kabupaten Buleleng	100 %	137.491.789	APBD II		50 %	47.553.975

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Kabupaten Buleleng	100 %	137.491.789	APBD II		50 %	47.553.975
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten /kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	137.491.789	APBD II		50 Orang	47.553.975
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman makam pahlawan dan nilai kepahlawanan	Kabupaten Buleleng	100 %	1.179.684.729	APBD II		50 %	357.254.411
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	Kabupaten Buleleng	100 %	1.179.684.729	APBD II		50 %	357.254.411

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	07	2.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	349.833.296	APBD II		0,50 Dokumen	20.478.070
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	1 Makam	757.811.388	APBD II		0,50 Makam	306.861.226
1	06	07	2.01	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	1 Laporan	72.040.045	APBD II		0,50 Laporan	29.915.115

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sistem, prosedur dan mekanisme kerja dari pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pelaksanaan administrasi di bidang sosial, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan baik yang menyangkut pelayanan sosial, pemberdayaan lembaga sosial maupun pembinaan karang taruna dan petugas sosial lainnya serta yang berkaitan dengan penataan dan pelestarian monumen serta penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya penanganan Isu Strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang disabilitas, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan. Program dan kegiatan tersebut akan menjawab terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Buleleng terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan

terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial/Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa bimbingan dan pelatihan keterampilan sosial, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan perlindungan dan jaminan sosial dan bantuan perbaikan gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, anak nakal, maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan yang lainnya.

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruhan wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan. Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan dengan SKPD/Lembaga terkait.

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial.
- c. Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan lain lain) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka bisa

- berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya.
- d. Rentannya wilayah Buleleng terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud.
 - e. Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng, orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan).
 - f. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya. Adapun peluang dimaksud adalah:

- a. Adanya jalinan koordinasi yang kooperatif dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah sosial.
- b. Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2024 diambil dari usulan masyarakat melalui Musrenbang tahun anggaran 2023, desa lokus, Hibah/Bansos dari usulan masyarakat yang diusulkan melalui Aplikasi dan usulan isidentil dari desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengakomodir usulan musrenbang dari masyarakat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial maka Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan standar kehidupannya secara adil dan merata. Kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup manusia, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud meliputi Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial. Dari keseluruhan penyelenggaraan sosial tersebut strategi pembangunan yang dikembangkan untuk tercapainya perwujudan tujuan dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pendeteksian, pencegahan timbulnya masalah sosial.
- b. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemetaan kerawanan sosial dalam upaya mendukung pendeteksian, pencegahan dan mitigasi timbulnya masalah sosial.
- d. Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah sosial.
- e. Meningkatkan pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial.
- f. Meningkatkan pengkajian dan pendataan nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.
- g. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung

operasional pelayanan penanganan masalah sosial.

- h. Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian SDM dalam mendukung kinerja penanganan masalah sosial.

Program Nasional yang menjadi prioritas terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yaitu dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan antara lain kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga.
- b. Mengetahui secara dini dan munculnya kerawanan sosial.
- c. Mencegah terhadap munculnya kerawanan sosial.
- d. Mengidentifikasi dan menginventarisasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng.
- e. Pemetaan lokasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng.
- f. Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- g. Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi karang taruna dan pekerja sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya.
- h. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama yang semakin mantap dalam penanggulangan masalah sosial.
- b. Diketuinya/terdeteksinya secara dini terhadap munculnya kerawanan sosial.
- c. Dapat dicegahnya terhadap munculnya kerawanan sosial.
- d. Teridentifikasinya dan terinventarisasinya kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng.
- e. Terpetakannya lokasi dan jenis kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng.
- f. Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi pencapaian sasaran, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial.
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Rehabilitasi Sosial.
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Penyediaan Permakanan.
 - Penyediaan Alat Bantu.
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
4. Program Penanganan Bencana.
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Dari 5 program yang menjadi program wajib dan 6 kegiatan serta 15 sub kegiatan, terdapat pula 1 program dan 5 kegiatan serta 15 sub kegiatan yang merupakan program penunjang. Penyebaran program dan kegiatan dialokasikan pada usulan hasil Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten yang menjadi program prioritas dari tiap-tiap Desa/Kelurahan serta Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi program Pengentasan Kemiskinan. Tabel Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				14.930.745.049		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	6.106.174.798	APBD II	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	116.491.955	APBD II	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	14 Dokumen	55.680.127	APBD II	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten	8 Laporan	60.811.828	APBD II	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Buleleng				
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	4.918.983.557	APBD II	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	27 Orang	4.528.657.049	APBD II	
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminitrasi tugas ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Dokumen	235.593.636	APBD II	
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Dokumen	154.732.872	APBD II	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	118.704.545	APBD II	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1 Paket	5.924.225	APBD II	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2 Paket	85.994.400	APBD II	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	3 Paket	16.705.920	APBD II	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	6 Laporan	10.080.000	APBD II	
1	06	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	823.584.741	APBD II	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	66.875.846	APBD II	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	224.400.481	APBD II	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	259.920.000	APBD II	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	272.388.414	APBD II	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	128.410.000	APBD II	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	34 Unit	81.620.000	APBD II	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	69 Unit	46.790.000	APBD II	
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kabupaten Buleleng	80 %	2.989.126.134	APBD II	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS yang aktif	Kabupaten Buleleng	80 %	2.989.126.134	APBD II	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	9 Orang	76.100.000	APBD II	
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	598 Keluarga	2.110.935.566	APBD II	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	6, 17 Lembaga	802.090.568	APBD II	
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS	Kabupaten Buleleng	9,86 %	4.569.752.008	APBD II	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Kabupaten Buleleng	1,5 %	4.497.937.600	APBD II	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	220 Orang	162.888.652	APBD II	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	25 Orang	63.217.204	APBD II	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	48.134.408	APBD II	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	63.024.408	APBD II	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	2.110 Orang	4.160.672.928	APBD II	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza di luar panti sosial yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Kabupaten Buleleng	1,5 %	71.814.408	APBD II	
1 06 04 2.02 0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	71.814.408	APBD II	
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kabupaten Buleleng	100 %	256.295.476	APBD II	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin	Kabupaten Buleleng	100 %	256.295.476	APBD II	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kabupaten Buleleng	4.000	182.974.424	APBD II	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat KPM yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	500	73.321.052	APBD II	
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Kabupaten Buleleng	100 %	135.454.540	APBD II	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Kabupaten Buleleng	100 %	135.454.540	APBD II	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten /kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	135.454.540	APBD II	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2024

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman makam pahlawan dan nilai kepahlawanan	Kabupaten Buleleng	100 %	873.942.093	APBD II	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	Kabupaten Buleleng	100 %	873.942.093	APBD II	
1	06	07	2.01		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	65.241.236	APBD II	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	1 Makam	739.775.225	APBD II	
1	06	07	2.01		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	1 Laporan	68.925.632	APBD II	

BAB IV

PENUTUP

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa ada dukungan dan partisipasi dari seluruh Komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sebagai mitra kerja, untuk itulah dituntut koordinasi dan kerjasama yang komunikatif dan berkelanjutan sehingga Pembangunan manusia khususnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan yaitu tercapainya masyarakat yang Mandiri, Sejahtera lahir dan batin berdasarkan konsep hidup Tri Hita Karana.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Renja ini substansinya memuat tentang program/kegiatan pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam 1 (satu) tahun.

Renja Perubahan ini juga menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta dalam penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Untuk dapat berhasilnya pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bagian/bidang yang ada di dalam jajaran kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Perlu adanya konsistensi dan sinergi antar bidang dalam perencanaan pembangunan, sehingga dalam implementasinya terpadu dan terintegrasi.
3. Perlu adanya dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan stakeholders lainnya untuk mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta sasaran Pembangunan Kabupaten Buleleng.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2024 ini disusun semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk kita semua khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).